



LAPORAN AKHIR

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STUDI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN PURBALINGGA



ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STUDI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Disusun Oleh:
CV. DIPHA YUDHA CAKRAWALA
Jalan Balai Kelurahan II No. 17 Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur,
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Studi Sektor Unggulan di Kabupaten Purbalingga

Penanggungjawab Penelitian :
Nama dan Gelar : Yudha Pratama, S.E.
NIK : 3303082204970001
Alamat Kantor : Jalan Balai Kelurahan II No. 17 Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah

Telp/Faks/Email : +6285-777-000-100 / +6281-6288-200/
dhipa.cakrawala@gmail.com

Alamat Rumah : Desa Lambur RT 002/RW 001, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga

Jumlah Anggota : 4 Tenaga Ahli

Lokasi Penelitian : Kabupaten Purbalingga

Jangka Waktu Penelitian : 45 (Empat Puluh Lima) Hari

Purbalingga, Desember 2023

Mengetahui:

Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Penelitian
DIREKTUR UTAMA
CV. Dhipa Yudha Cakrawala

Drs. Suroto, M.Si.
NIP. 19700203 199001 1 001

Yudha Pratama, S.E.

RINGKASAN

Tren positif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga ditopang oleh sektor – sektor ekonomi tertentu. Sektor industri pengolahan menjadi sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga di Tahun 2022. Sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor dengan kontribusi kedua dan ketiga pada PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Walaupun begitu, selama lima tahun terakhir tidak terdapat perubahan struktur ekonomi yang berarti di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah Analisis Location Quotient (*LQ*), Analisis Shift-Share, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Overlay*, dan Analisis Regresi Berganda.

Hasil penelitian ini adalah sektor yang menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2022 hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor jasa pendidikan. Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi hanya terjadi pada tahun 2019, tetapi menjadi sektor yang menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2022.

SUMMARY

The positive trend of economic growth in Purbalingga Regency is supported by certain economic sectors. The processing industry sector is the main sector that makes the largest contribution to Purbalingga Regency's Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 2022. The agricultural sector and the wholesale and retail trade sector, car and motorbike repairs are the sectors with the second and third contributions to Purbalingga Regency's GRDP in 2022. 2022. However, during the last five years there has been no significant change in the economic structure in Purbalingga Regency.

This research uses descriptive research methods with the secondary data collection technique used in this research is the documentation method. The analysis methods used are Location Quotient (LQ) Analysis, Shift-Share Analysis, Growth Ratio Model (MRP) Analysis, Overlay Analysis, and Multiple Regression Analysis.

The results of this research are the sectors that show a very dominant activity both in terms of growth and contribution during the period 2011 to 2022, only the agriculture, forestry and fisheries sectors and the educational services sector. The mining and quarrying sector and the water supply, waste management, waste and recycling sectors were very dominant both in terms of growth and contribution only in 2019, but were sectors that showed an activity with small growth but large contributions during the period 2011 to 2019. 2022.

PRAKATA

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Studi Sektor Unggulan di Kabupaten Purbalingga dapat diselesaikan. Penghargaan kami sampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas kepercayaan kepada kami untuk menyusun Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Studi Sektor Unggulan di Kabupaten Purbalingga. Kami ucapan terima kasih banyak kepada pihak terkait sehingga penyusunan kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Besar harapan kami hasil kajian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam upaya membentuk program/kebijakan di Kabupaten Purbalingga. Kami atas nama lembaga CV. Dipha Yudha Cakrawala mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan ini kepada kami.
2. Seluruh informan dan seluruh pihak yang telah menyediakan waktu dan membantu kami selama proses pengumpulan data.

Kami juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pembaca dan pihak terkait.

Banyumas, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sasaran.....	6
E. Ruang Lingkup	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	8
2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi	12
3. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	16
4. Sektor Unggulan	17
5. Teori Basis Ekonomi	19
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	22
B. Jenis dan Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Metode Analisis.....	23
a. Analisis Location Quotient (<i>LQ</i>).....	23
b. Analisis Shift-Share	24
c. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	27
d. Analisis <i>Overlay</i>	29

e. Analisis Regresi Berganda.....	30
f. Sektor Basis, Sektor Potensial, Sektor Dominan Dan Sektor Unggulan 36	
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga.....	37
B. Hasil Analisis Location Quetion (LQ)	38
C. Hasil Analisis Shift Share.....	40
D. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan	47
E. Analisis Overlay	50
F. Analisis Regresi Berganda.....	55
BAB V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2022	3
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2022	4
Tabel 3. 1 Uji Statistik Durbin Watson	33
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2022.....	39
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2011	41
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2013	42
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2016	43
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2019	45
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2022	46
Tabel 4. 7 Hasil Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2022	48
Tabel 4. 8 Hasil Analisis <i>Overlay</i>	51
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Berganda	55
Tabel 4. 10 Variance Inflation Factor (VIF).....	56
Tabel 4. 11 Uji Glejser	57
Tabel 4. 12 Uji Statistik Durbin Watson.....	58
Tabel 4. 13 Runs Test.....	58
Tabel 4. 14 Hasil Uji t	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2022 (%)	2
Gambar 4. 1 Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2013 – 2022	53
Gambar 4. 2 Peta Kabupaten Purbalingga	54

BAB 1. PENDAHULUAN

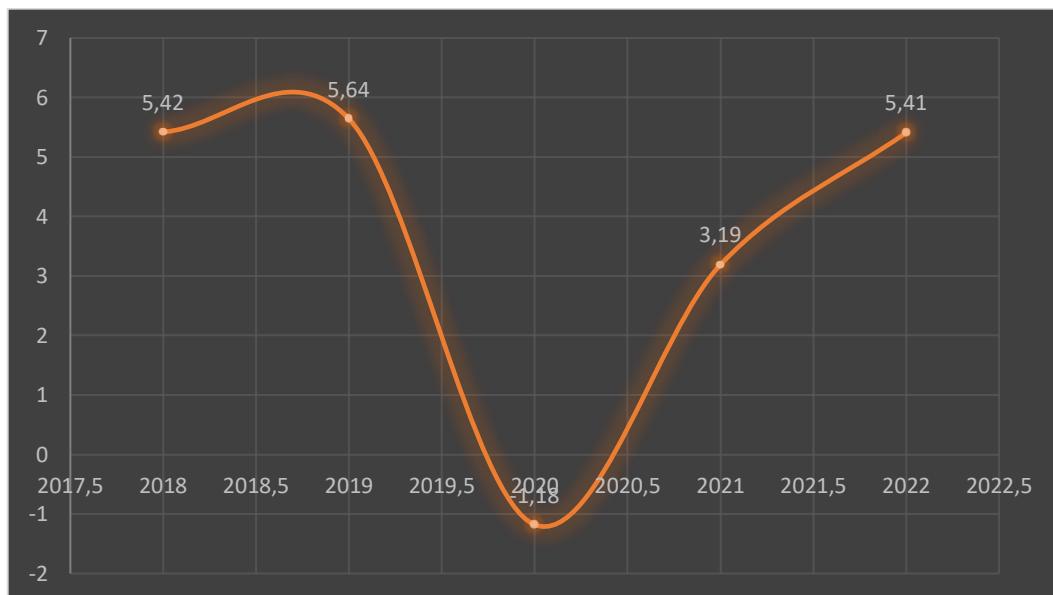
A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln, 2004).

Salah satu dinamika pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Oleh karena itu, semua wilayah mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu tujuan pembangunan wilayahnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, faktor – faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kemampuan wilayah dalam menggerakkan sektor-sektor andalannya, kepercayaan dan kestabilan dunia perbankan dan pembiayaan pemerintah dalam menopang kegiatan perekonomian secara keseluruhan, selain itu keadaan sosial-politik juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi pergerakan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan faktor eksternal lebih diakibatkan oleh perdagangan antar wilayah atau luar negeri, pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya dan kebijakan pemerintah pusat (Teguh, 2008).

Permasalahan yang dihadapi setiap daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah upaya dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Upaya tersebut adalah

dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada meliputi sumber daya manusia, sistem kelembagaan dan sumber daya fisik lokal daerah tersebut (Mulyanto, 2006). Selain itu, menemukan sektor unggulan di suatu daerah merupakan salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang efektif.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2022 (%)

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang berupaya untuk tumbuh kembali paska pandemi. Sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dapat dikategorikan baik. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 5,42 persen pada tahun 2018 menjadi 5,64 persen pada tahun 2019 menjadi indikasi bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Purbalingga yang baik. Sempat turun sebesar 1,23 persen pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga kembali meningkat menjadi 3,19 persen pada tahun 2021 dan 5,41 persen pada tahun 2022.

Tren positif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga ditopang oleh sektor – sektor ekonomi tertentu. Sektor industri pengolahan menjadi sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga di Tahun 2022.

Sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor dengan kontribusi kedua dan ketiga pada PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Walaupun begitu, selama lima tahun terakhir tidak terdapat perubahan struktur ekonomi yang berarti di Kabupaten Purbalingga. Perubahan hanya terjadi pada kontribusi sektor pertanian pada tahun 2022 yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sektor pertanian pada tahun 2022 juga menjadi sektor kontribusi tertinggi kedua terhadap PDRB, turun jika dibandingkan tahun 2017 dimana sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi.

Tabel 1. 1 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2022

No.	PDRB Lapangan Usaha	Tahun	
		2017	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.50	26.21
B	Pertambangan dan Penggalian	4.71	4.13
C	Industri Pengolahan	26.78	27.82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10	0.10
F	Konstruksi	5.99	6.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.55	12.56
H	Transportasi dan Pergudangan	3.14	3.79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.27	2.54
J	Informasi dan Komunikasi	1.70	1.94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.29	2.26
L	Real Estate	1.06	1.00
M,N	Jasa Perusahaan	0.18	0.20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.77	2.35
P	Jasa Pendidikan	5.89	5.74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.08	1.09
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.92	1.96
Produk Domestik Regional Bruto		100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berbeda dengan kontribusi sektoral, laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2022 tidak didominasi oleh

sektor pertanian dan industri pengolahan. Pada tahun 2017, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,95 persen. Arah perkembangan ekonomi pada tahun 2022 mengalami pergeseran dimana sektor transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pertama dan kedua. Pada tahun 2022, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 71,89 persen dan sektor sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 12,58 persen.

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2022

No.	PDRB Lapangan Usaha	Tahun	
		2017	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.43	4.28
B	Pertambangan dan Penggalian	1.01	-3.23
C	Industri Pengolahan	5.99	3.76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.63	4.03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.80	0.94
F	Konstruksi	9.35	1.42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.44	3.91
H	Transportasi dan Pergudangan	6.31	71.89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.46	12.58
J	Informasi dan Komunikasi	15.95	2.52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.27	0.74
L	Real Estate	6.08	2.71
M,N	Jasa Perusahaan	9.13	5.50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.97	1.40
P	Jasa Pendidikan	7.31	2.22
Q	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.29	2.24
R,S,T,U	R,S,T,U. Jasa lainnya	9.25	11.63
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto		5.37	5.41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan perbedaan kondisi kontribusi dan laju pertumbuhan sektoral tersebut, kajian untuk menilai menganalisis pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga. Dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Purbalingga, tentu tidak semuanya

merupakan sektor yang mempunyai kemampuan dalam menentukan besarnya Produk Domestik Regional Bruto. Analisis faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan identifikasi sektor unggulan yang ada di Kabupaten Purbalingga penting dilakukan agar kebijakan terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga dapat tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,41 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,31 persen. Akan tetapi, laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mendominasi di tahun 2022 ternyata memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga itu sendiri. Laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2022 yang sebesar 71,89 persen dan 12,58 persen ternyata hanya berkontribusi sebesar 3,79 persen dan 2,54 persen terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor apa sajakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimanakah perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimanakah kriteria pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga?
4. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan kajian pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga. Tujuan kajian pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga.
2. Menganalisis perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Purbalingga.
3. Menganalisis kriteria pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga.
4. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga.

D. Sasaran

Sasaran dalam penyusunan kajian pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga ini adalah sebagai acuan dalam menentukan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan maksud dan tujuan, hasil analisis kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dari aspek guna laksana, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan masukan dan informasi bagi pembuat keputusan dan pengambil kebijaksanaan untuk merumuskan arah pelaksanaan pembangunan dalam konteks optimalisasi peran dan kontribusi sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga.
2. Bahan masukan dan rekomendasi optimalisasi pembangunan sektoral di Kabupaten Purbalingga sebagai bahan kebijakan agar terjadi peningkatan kinerja pembangunan ekonomi yang mendorong pemerataan ekonomi antar wilayah dan antar sektoral.

E. Ruang Lingkup

Kajian ini masuk dalam ruang lingkup analisis ekonomi regional dan ekonomi pembangunan daerah. Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi

dan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga, kajian ini melengkapi pengumpulan data dan informasi, identifikasi, dan analisis. Pengumpulan data dan informasi bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Identifikasi meliputi identifikasi sektor unggulan dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Location Quotient (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Overlay*, Analisis Elastisitas dan Multiplier PDRB Terhadap sektor Ekonomi, serta Analisis Regresi Berganda.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung serta membantu dalam memecahkan masalah penelitian.

1. Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Sadono (1985), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ketahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam PDRB, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan ekonomi terjadi atau tidak (Lincoln, 2004). Pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan karena akan membuat masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang besar dan juga penyediaan barang dan jasa sosial, sehingga standar hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini terdapat penekanan pada tiga aspek, yaitu :

1. Proses

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang dan berubah dari waktu kewaktu.

2. Output per kapita

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, yang dalam hal ini terdapat dua unsur penting yaitu output total dan jumlah penduduk.

3. Jangka waktu

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila telah melewati jangka waktu yang cukup lama.

Kuznet (1971) dalam Todaro (1983), mengemukakan bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai ketentuan keadaan yang ada.

Menurut Jhingan (1993), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua ini merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Faktor-faktor tersebut termasuk dalam faktor non ekonomi. Adapun faktor ekonomi adalah sebagai berikut (Jhingan, 1993):

1. Sumber daya alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak dapat berkembang cepat.

2. Akumulasi modal

Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Prof. Nurkse menyatakan makna pembentukan modal ialah masyarakat tidak melakukan seluruh kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya saat konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian dari padanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam hal ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang menaikan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

3. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

4. Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

5. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dalam pembagian kerja menimbulkan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan

psikologi adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi (Jhingan, 1993).

Pembangunan ekonomi (*Economic Development*) mengandung arti yang lebih luas, meliputi perubahan tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pembangunan mempunyai tiga aspek penting yaitu : i) suatu proses merupakan perubahan terus menerus, ii) usaha untuk menaikan pendapatan perkapita, iii) kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung terus dalam jangka panjang (Sadono, 1985).

Pembangunan adalah kapasitas ekonomi nasional yang kondisi ekonominya yang terdahulu lebih banyak statis dalam beberapa waktu lamanya, kemudian mengangkat/menghasilkan dan menunjang peningkatan tiap tahun produk nasional kotornya (GNP) sampai mencapai tingkat lima sampai tujuh% atau lebih (Todaro, 1983).

Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut, pembangunan ekonomi mempunyai pengertian : i) suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, ii) usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, iii) kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang, iv) perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (Lincoln, 2004).

Meier (1995) dalam Mudrajad (2004), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Pembangunan ekonomi oleh beberapa ekonom dibedakan pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai:

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP (*Gross Domestic Product*) / GNP (*Gross National Product*) pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang berlaku dalam suatu daerah/negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (Lincoln, 2004).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya perkembangan atau pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan. Meskipun pada tingkat permulaan mungkin pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan dan sebaliknya. Pada akhirnya istilah perkembangan dan pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian tetapi dengan maksud yang sama, terutama dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah-masalah ekonomi (Irawan dan Suparmoko, 1992).

2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Dimulai dari mazhab historismus, pada mazhab ini tokoh yang terkenal adalah W.W. Rostow. Menurut Rostow, perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui semua Negara. Rostow membedakan kedalam 5 tahap yaitu: masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), tinggal landas (*the take off*), menuju ke kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Menurut teori ini Negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara

otomatis. Sedangkan Negara-negara berkembang atau yang masih terbelakang, pada umumnya masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua yaitu tahap tinggal landas (Todaro, 1983).

Sedangkan menurut Adam Smith (mazhab analitis) dalam Lincoln (2004) ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

1. Pertumbuhan output total.

Menurut Adam Smith terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi "tanah").

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber alam yang tersedia merupakan "batas maksimum" bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok kapital yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

- b. Sumber daya manusia (jumlah penduduk).

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Menurut Adam Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perkembangan penduduk akan memperluas pasar. Pada tahap ini dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan atau penurunan penduduk.

- c. Stok barang kapital yang ada.

Stok kapital memegang peran paling penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi, dan dengan demikian akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi pada tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital dan laju pertumbuhan stok kapital sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi.

2. Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistem yaitu tingkat upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika tingkat upah di atas tingkat upah subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun dan tingkat kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

Menurut neo klasik (Solow-Swan), pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan mengalami tingkat pengkerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi (Lincoln, 2004).

Teori Keynesian (Harrod-Domar) menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal dan output total, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut (Lincoln, 2004).

Menurut Kuznets (1971) dalam Todaro (1983), mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Tingkat kenaikan faktor produktivitas total yang tinggi
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
4. Tingkat transformasi sosial ideologi yang tinggi
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia

Pada tahun 1911 dalam bukunya yang bejulul *The Theory of Economic Development*, Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*. Sejalan dengan para ekonom modern, Schumpeter tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk maupun aspek keterbatasan sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi. Bagi Schumpeter, masalah

penduduk tidak dianggap sebagai aspek sentral dari proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1985).

Gambaran umum dari proses kemajuan ekonomi yang dikemukakan Schumpeter adalah dengan membedakan antara pengertian pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi walaupun keduanya sumber peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta yang menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya (Boediono, 1985).

3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Lincoln, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Lincoln, 2004).

Lincoln (2004) membedakan pengertian daerah (*region*) berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kedalam 3 kategori, yaitu :

1. Daerah homogen, yakni daerah dianggap sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam ruangan tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis, dan lain sebagainya.

2. Daerah nodal, yakni suatu daerah dianggap sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
3. Daerah perencanaan dan daerah administrative, yakni suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administratif tertentu, seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Pengertian daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.

Pengertian daerah administratif pada hakekatnya lebih sering digunakan jika berhubungan dengan pembahasan perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan : 1) pada pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan dari berbagai lembaga pemerintahan. Oleh karena itu akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah akonomi berdasarkan satuan administrative yang ada, 2) daerah yang batasannya ditentukan secara administrative lebih mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data diberbagai daerah dalam suatu negara, biasanya didasarkan pada satuan administrative (Lincoln, 2004), pengertian ini pula yang dipakai dalam penulisan ini.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan lamban. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki, dan juga adanya kecenderungan peranan investor yang memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas dan prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sutarno dan Mudrajad, 2003).

4. Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan atau kriteria. Menurut Tumenggung (1996), sektor unggulan adalah sektor yang

memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*), penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan memiliki empat kriteria yaitu:

- a. sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
- b. sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar,
- c. sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan
- d. sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Sambodo dalam Usya, 2006).

Sedangkan menurut Rachbini (2001) terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu:

- a. sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut;
- b. karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas;

- c. harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah;
- d. sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Dalam menyusun pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama. Menurut Restiatun (2009), pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran kinerja dalam melakukan pembangunan.

Menurut Richardson (dalam Tarigan, 2005), suatu daerah atau wilayah harus mampu membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung dengan cara mensinergikan sektor-sektor. Pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor tersebut adalah sektor unggulan (basis) dan bukan basis (non basis).

5. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari suatu wilayah. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi :

1. Kegiatan basis

Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogeneous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal).

2. Kegiatan nonbasis

Kegiatan nonbasis adalah semua kegiatan yang hanya digunakan untuk memenuhi permintaan lokal, sehingga permintaan sektor nonbasis hanya dipengaruhi pendapatan masyarakat setempat.

Penggabungan lapangan kerja basis dan lapangan kerja non basis merupakan total lapangan kerja yang tersedia di suatu wilayah. Rasio basis adalah perbandingan antara banyaknya lapangan kerja nonbasis yang tersedia untuk setiap satu lapangan kerja basis. Dapat diartikan bahwa setiap pertambahan satu lapangan kerja basis akan memacu adanya lapangan kerja nonbasis sebanyak rasio basis, sebaliknya pengurangan satu lapangan kerja basis akan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja nonbasis sebanyak rasio basis. Atas dasar anggapan diatas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah memelebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis (Tarigan, 2005).

B. Penelitian Terdahulu

Mukhlis (2001), meneliti perekonomian provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis shift-share (1990-1999). Hasil shift share menunjukkan adanya kenaikan persentase dalam kesempatan kerja nasional sebesar 17,3%. Kedua, dari peningkatan kesempatan kerja tersebut komponen pengaruhnya meliputi pengaruh pertumbuhan nasional, pengaruh bauran industri dan keunggulan kompetitif. Ketiga, baik pendekatan tradisional, EM maupun pendekatan Archelus memberikan hasil yang sama pada peningkatan kesempatan kerja aktual.

Wiyadi dan Rina Trisnawati (2004), meneliti tentang pengembangan wilayah eks-karesidenan surakarta dengan menggunakan teori pusat pertumbuhan. Berdasarkan perhitungan dengan indeks gravitasi dan model interaksi ruang maka interaksi kota-desa yang paling erat adalah kota Surakarta dengan kabupaten Sukoharjo. Sedangkan hasil perhitungan Location Quotient menunjukkan sektor unggulan di Kota Surakarta Dan Kabupaten Klaten adalah sektor bangunan, Kabupaten

Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen adalah sektor pertanian, Kabupaten Sukoharjo adalah sektor jasa, Kabupaten Karanganyar adalah sektor listrik, gas dan air bersih.

Kurniawan (2005), meneliti tentang efisiensi sektor unggulan di kabupaten Banyumas periode 1998-2003 menunjukkan perhitungan Location Quotient sektor basis yang bernilai lebih dari satu adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan yang memiliki peluang untuk dijual ke daerah lain dan memiliki *multiplier effect* terhadap tenaga kerja, produksi dan pengembangan wilayah. Dari perhitungan shift share pengembangan Kabupaten Banyumas berdasar spesialisasi bertumpu pada pertanian dan perdagangan kerena mayoritas kecamatan berspesialisasi pada sektor tersebut. Serta dari analisis DEA menunjukkan satu kecamatan efisien, lima kecamatan relatif efisien dan 11 kecamatan tidak efisien. Perdagangan 21 kecamatan dari 27 kecamatan tidak efisien serta pertanian dan perdagangan berada kondisi constant return to scale sedangkan sektor lainnya decreasing return to scale dan increasing return to scale.

Mulyanto Sudarmono (2006), meneliti tentang transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Wilayah Pertumbuhan I Jawa Tengah. Dari data PDRB dapat dilihat bahwa transformasi struktural hanya terjadi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Sedangkan Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Semarang dan Kota Salatiga sampai dengan tahun 2003 tidak terjadi perubahan struktural. Tetapi transformasi struktural yang terjadi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal tidak disertai oleh pergeseran penyerapan tenaga kerja sektoral dari pertanian ke sektor industri. Berdasarkan indeks Enthropi Theil dan indeks Williamson terjadi ketimpangan di wilayah pertumbuhan I, semakin besar dan tidak merata. Hipotesis kuznet menunjukkan hubungan antara ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja, dan Investasi. Definisi operasional dari variabel – variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Guna menghindari adanya fluktuasi kenaikan harga atau inflasi, PDRB yang dipakai adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000 sehingga perkembangan agregat terjadi dari tahun ketahun merupakan perkembangan produksi riil. Data diperoleh dari BPS Kabupaten Purbalingga Dalam Angka beberapa terbitan.

2. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah hasil bagi dari selisih antara PDRB pada tahun tertentu dan PDRB pada tahun sebelumnya dengan PDRB pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ketahun dan dinyatakan dalam%. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak. IPM dalam penelitian ini yaitu IPM Kabupaten Purbalingga dalam beberapa tahun terbit.

4. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja adalah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau

sedang mencari pekerjaan. Data angkatan kerja diperoleh melalui BPS Kabupaten Purbalingga Dalam Angka beberapa terbitan.

5. Investasi

Investasi dalam penelitian ini diukur dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Purbalingga dalam beberapa tahun terbit.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakanya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. BPS Kabupaten Purbalingga tahun 2018 - 2022
2. Bank Indonesia tahun 2018 - 2022.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan juga data yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

D. Metode Analisis

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Menurut Robinson (2005), analisis *Location Quotient (LQ)* merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB daerah

kabupaten/kota dari suatu sektor yang dititikberatkan pada struktur ekonomi daerah. LQ adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah/daerah dalam sektor atau karakteristik tertentu.

Teknik ini belum memberikan kesimpulan akhir. Kesimpulan yang diperoleh baru merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dibandingkan dengan teknik analisis lain seperti analisis MRP. Selain itu juga perlu mempertimbangkan data *existing* untuk mencari solusi apakah kesimpulan sementara tersebut terbukti kebenarannya.

$$LQ = \frac{(PDRB_{ij}/PDRB_{in})}{(TPDRB_j/TPDRB_n)} \dots \dots \dots (1)$$

$PDRB_{ij}$ = PDRB sektor i di Kabupaten Purbalingga

$PDRB_{in}$ = PDRB sektor i di Propinsi Jawa Tengah

$TPDRB_j$ = total PDRB di Kabupaten Purbalingga

$TPDRB_n$ = total PDRB di Propinsi Jawa Tengah

Hasil analisis LQ dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

- a. Bila $LQ > 1$, maka sektor tersebut mempunyai spesialisasi yang lebih tinggi dari rata-rata sektor di daerah, sehingga produk dari sektor tersebut dapat dieksport ke daerah lain.
- b. Bila $LQ = 1$, maka sektor tersebut mempunyai keunggulan yang sama dari rata-rata sektor di daerah, dan produk dari sektor tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri.
- c. Bila $LQ < 1$, sektor tersebut mempunyai keunggulan yang lebih rendah dari rata-rata sektor di daerah, dan sektor tersebut akan mengimpor produk dari daerah lain.

b. Analisis Shift-Share

Analisis *shift-share* merupakan salah satu alat yang dapat diterapkan untuk menganalisis pembangunan regional yang

mempelajari komponen-komponen pertumbuhan wilayah (Mukhlis, 2001). Menurut Robinson (2005) pertambahan lapangan kerja (*employment*) regional total (ΔE_r) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering juga disebut komponen *national share*. Komponen *national share* (NS) adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertambahan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen *shift* adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* (PS/Mij) dan *differential shift component* (DS/Cij).

Proportional shift component (PS/Mij) kadang-kadang sering disebut komponen struktural atau industrial mix, mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot. *Propotional shift* adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional.

Differential shift component (DS/CIj) kadang dinamakan komponen lokasional atau regional. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional internal. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keunggulan lokasional

seperti sumber daya yang melimpah akan mempunyai differential shift component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negative. *Differential shift* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus di daerah yang bersangkutan.

Metode *shift-share* dimulai dengan mengetahui tingkat pertumbuhan wilayah, dalam kasus ini adalah Kabupaten Purbalingga yang digambarkan dengan simbol r_n . Selanjutnya untuk wilayah yang lebih besar pada kasus ini adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan simbol mengukur perubahan PDRB suatu sektor i di suatu wilayah dengan rumus berikut.

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dengan :

D_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga);

N_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah acuan (Provinsi Jawa Tengah);

M_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga) yang disebabkan pertumbuhan sektor i di wilayah acuan (Provinsi Jawa Tengah);

C_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga) yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga).

Untuk menghitung komponen N_{ij} , M_{ij} , dan C_{ij} dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dengan :

E_{ij} = PDRB sektor i di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga) tahun awal analisis;

Ein = PDRB sektor i di wilayah acuan (Provinsi Jawa Tengah);
 En = PDRB total di wilayah acuan (Provinsi Jawa Tengah) tahun analisis;
 Eij,t = PDRB sektor i di wilayah amatan (Kabupaten Purbalingga) tahun akhir analisis;
 Ein,t = PDRB sektor i di wilayah acuan (Provinsi Jawa Tengah) tahun akhir analisis;
 En,t = PDRB total acuan (Provinsi Jawa Tengah) tahun akhir analisis;
 Rn = Rasio PDRB di Provinsi Jawa Tengah;
 Rij = Rasio PDRB dari sektor i di Kabupaten Purbalingga j;
 Rin = Rasio PDRB dari sektor i di Provinsi Jawa Tengah n.

c. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi sektor ekonomi terutama struktur ekonomi daerah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik eksternal (kabupaten/kota) maupun internal (wilayah studi yang lebih kecil) Pendekatan MRP dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR)

Dalam hal ini RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks propinsi Jawa Tengah dengan PDRB kabupaten/kota.

$\Delta E_i R$ = perubahan PDRB sektor i di Propinsi Jawa Tengah

ΔER = perubahan PDRB di Propinsi Jawa Tengah

$E_i R = \text{PDRB sektor } i \text{ di Propinsi Jawa Tengah}$

ER = PDRB di Propinsi Jawa Tengah

Jika RPR lebih besar dari 1 maka RPR dikatakan (+), yang berarti pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam tingkat kabupaten/kota lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB propinsi Jawa Tengah dan jika RPR lebih kecil dari 1 dikatakan (-), yang berarti bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam tingkat kabupaten/kota lebih rendah dari pertumbuhan PDRB Jawa Tengah.

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS)

Dalam hal ini RPS membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks kabupaten/kota dengan pertumbuhan sektor propinsi Jawa Tengah.

ΔE_i J = perubahan PDRB sektor i di Kabupaten Purbalingga

ΔEJ = perubahan PDRB di Kabupaten Purbalingga

E_i J = PDRB sektor i di Kabupaten Purbalingga

EJ = PDRB di Kabupaten Purbalingga

Jika RPR lebih besar dari 1 maka RPS dikatakan (+) yang berarti pertumbuhan suatu sektor produksi tertentu di tingkat kabupaten/kota lebih tinggi dari pertumbuhan sektor produksi tertentu propinsi dan jika RPS lebih kecil dari 1 dikatakan (-) yang berarti bahwa pertumbuhan suatu sektor produksi tertentu di tingkat kabupaten/kota lebih rendah dari pertumbuhan sektor propinsi. Dari hasil analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal kemudian hasil kombinasi keduanya dapat diperoleh deskripsi sektor ekonomi yang potensial dikembangkan di daerah kabupaten/kota di propinsi yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Klasifikasi 1, yaitu nilai (+) dan (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sektor ini disebut sebagai dominan pertumbuhan.

- b. Klasifikasi 2, yaitu nilai (+) dan (-) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat kabupaten/kota, namun belum menonjol di tingkat propinsi.
- c. Klasifikasi 3, yaitu nilai (-) dan (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten/kota, dan menonjol di tingkat propinsi. Sektor ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan dan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan.
- d. Klasifikasi 4, yaitu nilai (-) dan (-) berarti sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi.

Kendala yang dihadapi dalam menggunakan alat analisis MRP adalah pertumbuhan yang tidak selalu positif. Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam menentukan tanda (+) dan (-). Kendala yang mungkin timbul adalah:

- a. Jika RPr dan RPs dimana pembilang (+) dan penyebut (+) maka analisis dapat dilakukan langsung, yaitu (+) untuk >1 dan (-) untuk <1 .
 - b. Jika RPr dan RPs dimana pembilang (+) dan penyebut (-), maka analisis dapat dilakukan langsung memberi nilai (+).
 - c. Jika RPr dan RPs dimana pembilang (-) dan penyebut (+), maka analisis dapat dilakukan langsung memberi nilai (-).
 - d. Jika RPr dan RPs dimana pembilang (-) dan penyebut (-), perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut mengingat ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu :
 - pembilang $>$ penyebut, maka analisis langsung memberi nilai (+).
 - pembilang $<$ penyebut, maka analisis langsung memberi nilai (-).
- (Maulana, 1999).

d. Analisis *Overlay*

Analisis *Overlay* merupakan penggabungan atau penampilan lebih dari satu alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil

analisis yang paling baik, dimana hasil akhir dapat merupakan beberapa kemungkinan ataupun hanya merupakan hasil yang diinginkan saja. Analisis *Overlay* dalam penelitian ini merupakan rangkuman antara analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Terdapat empat kemungkinan dalam analisis *Overlay*:

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.
2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan.
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat memungkinkan merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan.
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kriteria kontribusi (Maulana, 1999).

e. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga digunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel. Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_n . Dalam analisis regresi pola hubungan antar variabel diekspresikan dalam sebuah persamaan regresi yang diduga

berdasar data sampel. Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$LN_PDRB_t = \beta_0 + \beta_1 LN_IPM_t + \beta_2 LN_AK_t + \beta_3 LN_INV_t + \varepsilon$$

Keterangan:

LN_PDRB_t = Logaritma Natural Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Purbalingga tahun ke t

LN_IPM = Logaritma Natural Indeks Pembangunan Manusia tahun ke t

AK_t = Angkatan Kerja tahun ke t

INV_t = Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tahun ke t

$\beta_0 \dots \beta_3$ = Koefisien regresi

ε = error term

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model persamaan regresi yang *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE), pengujian asumsi klasik perlu dilakukan. Uji asumsi klasik yang diperlukan antara lain multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pembahasan dari masing – masing permasalahan asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

- Uji Deteksi Multikolinieritas

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Tetapi pembedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi (Gujarati dan Porter, 2009). Multikolinearitas dalam

penelitian dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Terbebas dari masalah multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *Tolerance* lebih dari 0,1.

- Uji Deteksi Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati dan Porter, 2009). Untuk menguji masalah heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji glejser bertujuan untuk meregres nilai absolute residual ($AbsU_i$) terhadap variabel independen lainnya dengan persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, 2009):

$$|U_i| = \alpha + \beta X_i + \mu_i$$

Jika β signifikan, maka model regresi yang digunakan mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas.

- Uji Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota observasi (variabel) yang berlainan waktu. Sedangkan dalam metode OLS salah satunya asumsinya adalah tidak adanya hubungan antar variabel gangguan. Autokorelasi terjadi karena adanya *shock* atau gejolak dalam suatu data, umumnya sering terjadi pada data *time series* sedangkan data cross section jarang mengalami autokorelasi.

Dalam mendeteksi adanya autokorelasi digunakan metode Durbin-Watson (DW) dengan persamaan:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + e_t$$

Dalam menguji autokorelasi maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0: \rho = 0$ atau berarti tidak terdapat autokorelasi

$H_1: \rho \neq 0$ atau berarti terdapat autokorelasi

Untuk menguji hipotesis nol, uji statistik Durbin-Watson didasarkan pada residual metode OLS. Formula uji statistik Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{e}_t - \hat{e}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{e}_t^2}$$

\hat{e}_t adalah residual metode kuadrat terkecil. Persamaan di atas dimanipulasi menjadi :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n \hat{e}_t^2 + \sum_{t=2}^n \hat{e}_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^n \hat{e}_t \hat{e}_{t-1}}{\sum_{t=1}^n \hat{e}_t^2}$$

$$d = 1 + 1 - 2\rho \text{ dimana } \rho = \frac{\sum \hat{e}_t \hat{e}_{t-1}}{\sum \hat{e}_t^2}$$

$$d = 2(1 - \rho)$$

$$-1 \leq \rho \leq 1$$

$$\text{Maka } 0 \leq d \leq 4$$

Jika nilai d adalah 2 maka tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika $\rho = +1$, nilai d = 0 maka ada autokorelasi positif. Jika nilai d semakin mendekati 0 maka semakin besar terjadinya autokorelasi positif dan jika $\rho = -1$, nilai d = 4 maka ada autokorelasi negatif dan semakin mendekati 4 maka semakin besar terjadinya autokorelasi negatif.

Tabel 3. 1 Uji Statistik Durbin Watson

Nilai statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif atau negatif
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol; ada korelasi negatif

Sumber : Agus Widarjono

Catatan : d_U = nilai kritis batas bawah
 d_L = nilai kritis batas atas

2. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *Goodness of fit* atau dalam statistik dapat diukur dengan nilai uji statistik F, koefisien determinasi (R^2), dan nilai uji statistik t.

1) Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis sering disebut pengujian signifikan keseluruhan (*overall significance*) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan dengan X_1, X_2, X_3, X_4 , dan X_5 . Kriteria pengujian nilai F statistik dengan menggunakan *level of confidence* 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah sebagai berikut :

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k = 0$ Semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

H_a : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \neq 0$ Semua variabel atau minimal satu variabel berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

$$F = \frac{\frac{ESS}{df}}{\frac{RSS}{df}} = \frac{\frac{ESS}{(k-1)}}{\frac{RSS}{(n-k)}}$$

Jika $F_{hitung} < F_{Tabel}$ maka H_0 diterima;

Jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$ maka H_0 ditolak.

Terdapat hubungan yang erat antara R^2 dengan nilai F test. Secara sistematis dapat dinyatakan dalam rumus :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Jika $R^2 = 0$, maka fungsi F juga sama dengan 0. Jika $R^2 = 1$ maka F menjadi tak terhingga. Jadi Uji F statistik sama dengan pengujian terhadap nilai R^2 .

2) Uji statistik t

Uji satatistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Jika asumsi normalitas *error* terpenuhi maka kita dapat menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial regresi.

Contohnya untuk menguji pengaruh signifikansi variabel X_1 terhadap Y dengan menganggap variabel lain konstan maka digunakan rumus :

$$\text{Uji } t = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

Keterangan :

β_i : Koefisien parameter;

$(se) \beta_i$: *Standard Error* koefisien parameter.

Jika nilai $t_{hitung} \leq$ nilai $t_{tabel} t\alpha$ ($Sig \geq 0,05$), maka H_0 diterima.

Jika nilai $t_{hitung} >$ nilai $t_{tabel} t\alpha$ ($Sig < 0,05$), maka H_0 ditolak.

3) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilainya maka kemampuan variabel dependen menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya. Koefisien determinasi dapat ditulis dengan formula :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} \text{ atau } \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}$$

Dengan catatan $TSS = ESS + RSS$ maka dapat digunakan alternatif :

$$\begin{aligned} R^2 &= \frac{ESS}{TSS} \\ &= \frac{TSS - RSS}{TSS} \\ &= 1 - \frac{RSS}{TSS} \\ &= 1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} \end{aligned}$$

f. Sektor Basis, Sektor Potensial, Sektor Dominan Dan Sektor Unggulan

Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Sektor basis adalah sektor produksi yang mempunyai spesialisasi yang lebih tinggi dari rata-rata sektor di daerah, sehingga produk dari sektor tersebut dapat dieksport ke daerah lain. (Robinson, 2005)
- Sektor unggulan adalah sektor produksi yang memiliki pertumbuhan positif dan kontribusi positif, menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi. (Maulana, 1999).
- Sektor dominan adalah suatu sektor yang memiliki pertumbuhan positif baik di wilayah studi (kabupaten/kota) dan di wilayah referensi (provinsi), sehingga sektor produksi tersebut merupakan sektor dominan yang dikembangkan baik di wilayah studi maupun wilayah referensi. (Maulana, 1999).
- Sektor potensial adalah pertumbuhan suatu sektor produksi yang memiliki nilai positif di wilayah studi (kabupaten/kota) tanpa disertai pertumbuhan positif di wilayah refensi (propinsi) sehingga sektor produksi ini merupakan sektor produksi yang potensial untuk dikembangkan untuk meningkatkan PDRB provinsi (MRP) atau sektor produksi yang memiliki nilai pertumbuhan positif akan tetapi nilai kontribusi negatif (*Overlay*) (Maulana, 1999).

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi: 101011'–109035' Bujur Timur dan 7010'–7029' Lintang Selatan. Sebelah Utara Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan. Sebelah Timur Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Sebelah Selatan Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas. Sebelah Barat Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan Kabupaten Banyumas. Jarak Purbalingga ke Kota Semarang adalah 191 km, Purwokerto adalah 20 km, Cilacap adalah 60 km, Banjarnegara adalah 45 km dan Wonosobo adalah 75 km.

Luas wilayah wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha). Dari 18 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.159 ha. Urutan kedua Kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 ha, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Karangmoncol yaitu 6.027 ha. Tiga Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah dengan luas masing-masing 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.251 ha.

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/ perbukitan dan dataran rendah. Bagian Utara Purbalingga merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet. Bagian Selatan Purbalingga merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Kondisi Hidrologi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama curah hujan, jenis tanah dan batuan yang ada serta topografi. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada kemampuan tanah untuk menyimpan (storage) dan meloloskan air (porositas tanah).

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Serayu dan Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Ponggawa, Gemuruh, Kajar, Lembereng, Tlahab, Soso, Lebak, Tuntung Gunung, Laban, Kuning, Wotan, Ginyung, Tambra dan Sungai Muli.

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Serayu dan Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Ponggawa, Gemuruh, Kajar, Lembereng, Tlahab, Soso, Lebak, Tuntung Gunung, Laban, Kuning, Wotan, Ginyung, Tambra dan Sungai Muli.

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Serayu dan Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Ponggawa, Gemuruh, Kajar, Lembereng, Tlahab, Soso, Lebak, Tuntung Gunung, Laban, Kuning, Wotan, Ginyung, Tambra dan Sungai Muli.

B. Hasil Analisis Location Quetion (LQ)

Dalam lingkup daerah dalam suatu negara, suatu komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal di daerahnya sendiri, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Pada tingkat agregat, suatu sektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor atau subsektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan di daerahnya melainkan juga di luar daerahnya. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor atau subsektor basis.

Keberadaan basis ekonomi dari suatu daerah berperan besar bagi daerah tersebut untuk mengembangkan potensinya. Basis ekonomi ini menentukan arah dan prioritas pembangunan dari daerah yang bersangkutan guna mendapatkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2022

Sektor	Tahun					Keterangan
	2011	2013	2016	2019	2022	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.93	1.9	1.97	2.00	2.00	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	2.38	2.44	1.89	1.86	1.93	Basis
C. Industri Pengolahan	0.69	0.71	0.74	0.77	0.8	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.57	0.59	0.58	0.57	0.57	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.76	1.74	1.76	1.8	1.72	Basis
F. Konstruksi	0.57	0.58	0.59	0.61	0.6	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.95	0.95	0.95	0.96	0.93	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1.09	1.1	1.1	1.07	1.09	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.79	0.78	0.79	0.8	0.8	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0.51	0.54	0.53	0.54	0.5	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.82	0.81	0.81	0.81	0.8	Non Basis
L. Real Estate	0.65	0.65	0.66	0.66	0.64	Non Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0.48	0.51	0.49	0.5	0.51	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.04	1.05	1.04	1.03	1.02	Basis
P. Jasa Pendidikan	1.31	1.4	1.39	1.39	1.38	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.24	1.25	1.28	1.29	1.24	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.26	1.28	1.28	1.28	1.29	Basis

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kondisi Kabupaten Purbalingga berdasarkan sektor basis tidak mengalami perubahan berarti selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Sektor baris di Kabupaten Purbalingga meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan air, sektor pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sektor – sektor tersebut memiliki nilai Location

Quotient (LQ) lebih besar dari 1. Dengan kata lain, sektor – sektor tersebut mempunyai spesialisasi yang lebih tinggi dari rata-rata sektor di daerah, sehingga produk dari sektor tersebut dapat dieksport ke daerah lain.

C. Hasil Analisis Shift Share

Untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi dapat menggunakan analisis shift-share. Analisis shift-share dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi di Kabupaten Purbalingga terhadap struktur ekonomi nasional (Provinsi Jawa Tengah). Melalui alat analisis ini akan dapat diketahui pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah, perubahan relatif suatu daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional dan daya saing sektor tertentu di daerah dibandingkan nasional.

Analisis shift-share dapat diurai menjadi komponen shift dan komponen share. Komponen share sering juga disebut dengan komponen national share (NS). National share merupakan kriteria bagi suatu daerah untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata. Komponen shift adalah penyimpangan dari national share dalam pertumbuhan ekonomi suatu regional. Komponen shift ini terbagi menjadi dua komponen yaitu komponen proportional shift (PS) dan komponen differential shift (DS). Proportional shift akan bernilai positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot. Suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai differential shift (DS) yang positif dan begitupun sebaliknya.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2011

PDRB ADHK	2010 - 2011						
	NS	PS	DS	Total	Rasio NS	Rasio PS	Rasio DS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	176.19	6.75	35.46	218.41	80.67	3.09	16.24
B. Pertambangan dan Penggalian	28.32	-0.62	20.16	47.85	59.17	-1.30	42.13
C. Industri Pengolahan	135.34	7.03	49.89	192.26	70.40	3.65	25.95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.34	0.02	-0.06	0.30	112.21	8.23	-20.44
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.90	0.02	-0.25	0.67	133.99	3.04	-37.03
F. Konstruksi	34.78	0.78	-9.46	26.09	133.29	2.98	-36.27
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	81.70	6.73	17.79	70.64	115.66	9.52	-25.19
H. Transportasi dan Pergudangan	19.15	0.90	-6.46	13.59	140.90	6.64	-47.54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.84	0.77	-3.00	11.61	119.22	6.64	-25.86
J. Informasi dan Komunikasi	9.69	0.78	1.39	11.86	81.73	6.56	11.71
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.31	0.55	-3.84	10.02	132.81	5.50	-38.30
L. Real Estate	6.47	0.39	-1.41	5.45	118.65	7.22	-25.87
M,N. Jasa Perusahaan	0.78	0.07	0.14	0.99	78.56	7.33	14.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.22	0.49	-3.10	16.61	115.70	2.97	-18.67
P. Jasa Pendidikan	19.45	3.58	9.42	32.45	59.94	11.03	29.03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.77	0.46	-0.83	4.40	108.22	10.54	-18.76
R,S,T,U. Jasa lainnya	11.49	0.31	-2.08	9.72	118.19	3.18	-21.37

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan *shift share* tahun 2010 - 2011 di Kabupaten Purbalingga. Nilai *national share* yang positif menggambarkan bahwa Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Nilai rasio *national share* terbesar dimiliki sektor transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 140,90 persen, sedangkan nilai rasio *national share* terendah dimiliki oleh sektor pertambangan dan galian yaitu sebesar 59,17 persen.

Untuk perhitungan rasio *proportional shift* di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai positif dan negatif. Nilai *proportional shift* negatif terjadi pada sektor pertambangan dan galian. Nilai rasio *proportional shift* negatif berarti bahwa sektor tersebut menjadi sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan mungkin sedang merosot, sedangkan sektor yang

memiliki rasio *proportional shift* positif yaitu sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan cepat.

Hasil perhitungan rasio *differential shift* memiliki nilai positif dan negatif. Sektor yang memiliki nilai rasio *differential shift* positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Sektor lain diluar sektor tersebut memiliki rasio *differential shift* negatif. Nilai rasio *differential shift* positif berarti bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki keuntungan lokasional pada sektor – sektor tersebut.

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2013

PDRB ADHK	2012 - 2013						
	NS	PS	DS	Total	Rasio NS	Rasio PS	Rasio DS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	181.954	3.920	7.079	192.954	94.299	2.032	3.669
B. Pertambangan dan Penggalian	29.976	1.850	4.046	35.872	83.564	5.157	11.279
C. Industri Pengolahan	151.259	8.245	63.239	222.743	67.908	3.702	28.391
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.390	0.032	0.151	0.573	68.065	5.658	26.277
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.859	0.002	-0.016	0.846	101.608	0.231	-1.839
F. Konstruksi	36.451	1.786	0.588	38.825	93.886	4.600	1.515
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86.272	4.069	9.345	99.686	86.543	4.082	9.375
H. Transportasi dan Pergudangan	20.366	1.900	6.380	28.646	71.098	6.631	22.271
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.809	0.668	-3.268	12.209	121.295	5.468	-26.764
J. Informasi dan Komunikasi	11.942	0.954	2.966	15.862	75.282	6.017	18.701
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.602	0.529	-1.235	12.895	105.480	4.101	-9.581
L. Real Estate	6.942	0.534	0.800	8.277	83.875	6.457	9.668
M,N. Jasa Perusahaan	0.918	0.111	0.910	1.939	47.336	5.738	46.926
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.924	0.501	6.532	25.957	72.905	1.930	25.165
P. Jasa Pendidikan	28.265	2.694	10.247	41.207	68.593	6.539	24.868
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.609	0.400	-0.237	5.771	97.188	6.922	-4.111
R,S,T,U. Jasa lainnya	11.461	1.058	2.448	14.967	76.573	7.072	16.355

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan *shift share* tahun 2012 - 2013 di Kabupaten Purbalingga yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan

tahun 2010 - 2011. Nilai *national share* yang positif menggambarkan bahwa Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Nilai rasio *national share* terbesar dimiliki sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 121.29 persen, sedangkan nilai rasio *national share* terendah dimiliki oleh sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 47.33 persen. Berbeda dengan tahun 2010 – 2011, perhitungan rasio *proportional shift* tahun 2012 – 2013 di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai positif. Nilai *proportional shift* yang positif mengindikasikan bahwa sektor - sektor tersebut secara nasional tumbuh dengan cepat.

Hasil perhitungan rasio *differential shift* memiliki nilai positif dan negatif. Sektor yang memiliki nilai rasio *differential shift* negatif adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor lain diluar sektor tersebut memiliki rasio *differential shift* positif. Nilai rasio *differential shift* positif berarti bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki keuntungan lokasional pada sektor - sektor tersebut.

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2016

PDRB ADHK	2015 - 2016						
	NS	PS	DS	Total	Rasio NS	Rasio PS	Rasio DS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85.29	1.88	32.92	120.09	71.02	1.56	27.41
B. Pertambangan dan Penggalian	13.98	2.65	-119.11	-102.47	-13.65	-2.59	116.24
C. Industri Pengolahan	80.02	3.28	31.31	114.61	69.82	2.86	27.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.20	0.01	-0.06	0.15	130.67	5.97	-36.63
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.39	0.01	-0.01	0.39	101.07	2.20	-3.27
F. Konstruksi	18.29	1.19	9.23	28.72	63.70	4.16	32.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	42.54	2.41	-14.64	30.31	140.36	7.95	-48.31
H. Transportasi dan Pergudangan	11.23	0.55	3.27	15.06	74.60	3.67	21.73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.65	0.48	-1.64	6.49	117.87	7.38	-25.25
J. Informasi dan Komunikasi	6.68	0.56	0.13	7.37	90.68	7.53	1.79
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.73	0.59	0.63	7.94	84.67	7.42	7.91

PDRB ADHK	2015 - 2016						
	NS	PS	DS	Total	Rasio NS	Rasio PS	Rasio DS
L. Real Estate	3.77	0.26	-0.13	3.90	96.76	6.59	-3.35
M,N. Jasa Perusahaan	0.52	0.06	-0.05	0.53	98.50	10.46	-8.96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.85	0.21	0.09	9.15	96.72	2.29	0.98
P. Jasa Pendidikan	15.64	1.15	2.50	19.28	81.08	5.96	12.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.11	0.31	-0.23	3.19	97.51	9.61	-7.12
R,S,T,U. Jasa lainnya	6.04	0.52	-0.30	6.26	96.51	8.34	-4.85

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Tabel 4.4 menunjukkan hasil perhitungan *shift share* tahun 2015 - 2016 di Kabupaten Purbalingga yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2012 - 2013. Nilai *national share* yang positif menggambarkan bahwa Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Nilai rasio *national share* terbesar dimiliki sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 140.36 persen, sedangkan nilai rasio *national share* terendah dimiliki oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar -13.65 persen. Serupa dengan tahun 2012 – 2013, perhitungan rasio *proportional shift* tahun 2015 – 2016 di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai positif. Nilai *proportional shift* yang positif mengindikasikan bahwa sektor - sektor tersebut secara nasional tumbuh dengan cepat.

Hasil perhitungan rasio *differential shift* memiliki nilai positif dan negatif. Sektor yang memiliki nilai rasio *differential shift* negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sektor lain diluar sektor tersebut memiliki rasio *differential shift* positif. Nilai rasio *differential shift* positif berarti bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki keuntungan lokasional pada sektor - sektor tersebut.

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2019

PDRB ADHK	2018 - 2019						
	NS	PS	DS	Total	Rasio NS	Rasio PS	Rasio DS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	228.10	2.99	9.86	240.96	94.66	1.24	4.09
B. Pertambangan dan Penggalian	36.13	1.21	7.80	45.15	80.03	2.69	17.28
C. Industri Pengolahan	228.48	11.58	96.11	336.16	67.97	3.44	28.59
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.55	0.03	0.02	0.60	91.95	5.04	3.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.11	0.05	0.21	1.37	80.86	3.51	15.63
F. Konstruksi	55.48	2.75	13.52	71.74	77.33	3.83	18.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	122.10	7.28	12.22	141.60	86.23	5.14	8.63
H. Transportasi dan Pergudangan	32.26	2.74	3.80	38.80	83.15	7.06	9.79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.77	2.07	4.21	29.05	78.39	7.11	14.50
J. Informasi dan Komunikasi	23.06	2.68	0.11	25.85	89.21	10.37	0.42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	19.44	0.68	0.47	20.59	94.41	3.31	2.28
L. Real Estate	11.02	0.61	0.31	11.94	92.31	5.11	2.58
M,N. Jasa Perusahaan	1.68	0.18	0.13	1.99	84.39	8.90	6.71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.29	0.86	0.11	24.27	95.97	3.56	0.47
P. Jasa Pendidikan	47.43	3.60	0.47	51.51	92.09	6.99	0.92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.88	0.66	0.50	11.04	89.49	6.02	4.50
R,S,T,U. Jasa lainnya	19.12	1.73	0.72	21.56	88.67	8.00	3.33

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan *shift share* tahun 2018 - 2019 di Kabupaten Purbalingga yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2015 - 2016. Nilai *national share* yang positif menggambarkan bahwa Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Nilai rasio *national share* terbesar dimiliki sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 95,97 persen, sedangkan nilai rasio *national share* terendah dimiliki oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 67.97 persen. Serupa dengan tahun 2015 - 2016, perhitungan rasio *proportional shift* tahun 2018 - 2019 di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai positif. Nilai *proportional shift* yang positif mengindikasikan bahwa sektor - sektor tersebut secara nasional tumbuh dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi pada hasil

perhitungan rasio *differential shift* yang memiliki nilai positif berarti bahwa Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 – 2019 memiliki keuntungan lokasional pada sektor – sektor tersebut.

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2022

PDRB ADHK	2021 - 2022						
	NS	PS	DS	Total	Rasio NS	Rasio PS	Rasio DS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	236.81	6.92	60.76	304.49	77.77	2.27	19.96
B. Pertambangan dan Penggalian	39.45	-2.44	22.02	59.03	66.84	-4.14	37.30
C. Industri Pengolahan	252.08	9.78	-5.72	256.13	98.42	3.82	-2.23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.63	0.02	0.03	0.68	92.04	3.49	4.48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.22	0.01	-0.02	1.21	100.79	1.02	-1.81
F. Konstruksi	61.13	1.12	-4.81	57.44	106.43	1.95	-8.38
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.68	5.64	-10.05	126.26	103.50	4.47	-7.96
H. Transportasi dan Pergudangan	25.16	18.38	-5.38	38.16	65.94	48.16	-14.10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.48	4.33	-21.14	8.67	293.79	49.91	-243.70
J. Informasi dan Komunikasi	29.72	0.74	0.13	30.59	97.15	2.43	0.42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	20.75	0.11	0.81	21.67	95.75	0.50	3.75
L. Real Estate	11.80	0.60	-5.28	7.13	165.59	8.43	-74.02
M,N. Jasa Perusahaan	1.85	0.11	-0.22	1.74	105.83	6.50	-12.34
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.80	0.37	-0.77	23.41	101.68	1.60	-3.28
P. Jasa Pendidikan	50.61	0.80	6.15	57.56	87.93	1.39	10.68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.13	0.28	-0.57	10.85	102.65	2.58	-5.22
R,S,T,U. Jasa lainnya	19.56	2.31	-0.60	21.26	92.00	10.85	-2.84

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Tabel 4.6 menunjukkan hasil perhitungan *shift share* tahun 2021 - 2022 di Kabupaten Purbalingga yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2018 - 2019. Nilai *national share* yang positif menggambarkan bahwa Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Nilai rasio *national share* terbesar dimiliki sektor real estate yaitu sebesar 165.59 persen, sedangkan nilai rasio *national share* terendah dimiliki oleh sektor transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 65.94 persen.

Berbeda dengan tahun 2018 - 2019, perhitungan rasio *proportional shift* tahun 2021 - 2022 di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai positif hampir di seluruh sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Nilai *proportional shift* yang positif mengindikasikan bahwa sektor - sektor tersebut secara nasional tumbuh dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi pada hasil perhitungan rasio *differential shift* yang memiliki nilai positif dan nilai negatif. Sektor yang memiliki nilai rasio *differential shift* positif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan sektor jasa pendidikan. Sektor lain diluar sektor tersebut memiliki rasio *differential shift* negatif. Nilai rasio *differential shift* positif berarti bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki keuntungan lokasional pada sektor - sektor tersebut.

D. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis Model Rasio Pertumbuhan dilakukan untuk melihat persepsi sektor ekonomi terutama struktur ekonomi daerah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik eksternal (wilayah referensi) maupun internal (wilayah studi yang lebih kecil). Dengan model ini maka dapat diketahui sektor - sektor ekonomi yang merupakan dominan pertumbuhan dan potensial pertumbuhan. Suatu sektor disebut dominan pertumbuhan jika sektor tersebut memberikan nilai Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) positif (lebih dari 1), artinya sektor tersebut memberikan pertumbuhan dominan dalam wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah) dan wilayah studi (Kabupaten Purbalingga), ditunjukkan dengan nilai RPR dan RPS lebih besar atau sama dengan satu. Sedangkan suatu sektor dikatakan potensial pertumbuhan jika sektor tersebut memberikan nilai RPR negatif (kurang dari 1) dan RPS positif (lebih dari 1), yang artinya sektor tersebut memberikan pertumbuhan dominan dalam wilayah studi (Kabupaten Purbalingga).

Tabel 4.7 menunjukkan hasil model rasio pertumbuhan yang berbeda dari tahun 2011 sampai dengan 2022. Pada tahun 2011, Kabupaten

Purbalingga memiliki sektor dominan pertumbuhan pada sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Sektor - sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Sektor yang memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat kabupaten, namun belum menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun sektor yang memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten, dan menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan.

**Tabel 4. 7 Hasil Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011 - 2022**

Sektor	2011		2013		2016		2019		2022	
	RPR	RPS	RPR	RPS	RPR	RPS	RPR	RPS	RPR	RPS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.72	1.28	0.42	1.09	0.42	1.39	0.24	1.18	0.55	1.47
B. Pertambangan dan Penggalian	-0.41	-0.72	1.21	1.11	3.62	0.01	0.63	1.34	-1.17	0.52
C. Industri Pengolahan	0.98	1.38	1.07	1.39	0.78	1.21	0.95	1.44	0.73	0.97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.38	0.87	1.63	1.24	0.87	0.86	1.02	1.03	0.71	1.07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.43	0.35	0.04	0.59	0.41	0.97	0.81	1.24	0.19	0.91
F. Konstruksi	0.42	0.35	0.96	1.02	1.24	1.17	0.92	1.26	0.35	0.77
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.55	0.86	0.92	1.12	1.08	0.87	1.11	1.09	0.81	0.91
H. Transportasi dan Pergudangan	0.89	0.62	1.83	1.17	0.94	1.13	1.58	1.07	13.75	0.98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.05	0.79	0.88	0.75	1.19	0.92	1.69	1.11	3.20	0.74
J. Informasi dan Komunikasi	1.51	1.09	1.56	1.16	1.58	1.01	2.17	1.00	0.47	1.01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.78	0.63	0.76	0.88	1.67	1.02	0.65	1.04	0.10	1.40
L. Real Estate	1.15	0.81	1.51	1.08	1.30	0.99	1.03	1.03	0.96	0.53
M,N. Jasa Perusahaan	1.76	1.10	2.37	1.42	2.02	0.98	1.97	1.04	1.16	0.90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.48	0.67	0.52	1.67	0.45	1.01	0.69	1.01	0.30	0.89
P. Jasa Pendidikan	3.47	1.14	1.87	1.19	1.40	1.05	1.42	1.01	0.30	1.41
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.84	0.91	1.39	0.97	1.88	0.98	1.25	1.04	0.47	0.89
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.51	0.64	1.81	1.12	1.65	0.99	1.68	1.02	2.22	0.99

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Pada tahun 2013, pergeseran sektor dominan pertumbuhan terjadi dimana sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya memiliki nilai Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) positif (lebih dari 1). Sektor - sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Sektor yang memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat kabupaten, namun belum menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun sektor yang memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten, dan menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pada tahun 2016, sektor dominan pertumbuhan terjadi sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa pendidikan. Sektor - sektor tersebut memiliki nilai Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) positif (lebih dari 1). Sektor - sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Sektor yang memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat kabupaten, namun belum menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Adapun sektor yang memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten, dan menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pada tahun 2019, sektor dominan pertumbuhan terjadi sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sektor - sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Diluar sektor dominan pertumbuhan, sektor lainnya merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten, dan menonjol di tingkat provinsi.

Berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga tidak memiliki sektor dominan pertumbuhan. Kabupaten Purbalingga memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat kabupaten, namun belum menonjol di tingkat provinsi yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Sektor yang memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten dan menonjol di tingkat provinsi terlihat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa pendidikan.

E. Analisis Overlay

Analisis Overlay dalam pembahasan ini adalah mengabungkan antar analisis *Location Quotient* (LQ) dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), maka akan dapat diketahui sektor unggulan yang merupakan sektor produksi yang memiliki nilai positif baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kontribusi. Terdapat empat kemungkinan dalam analisis *Overlay*:

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.

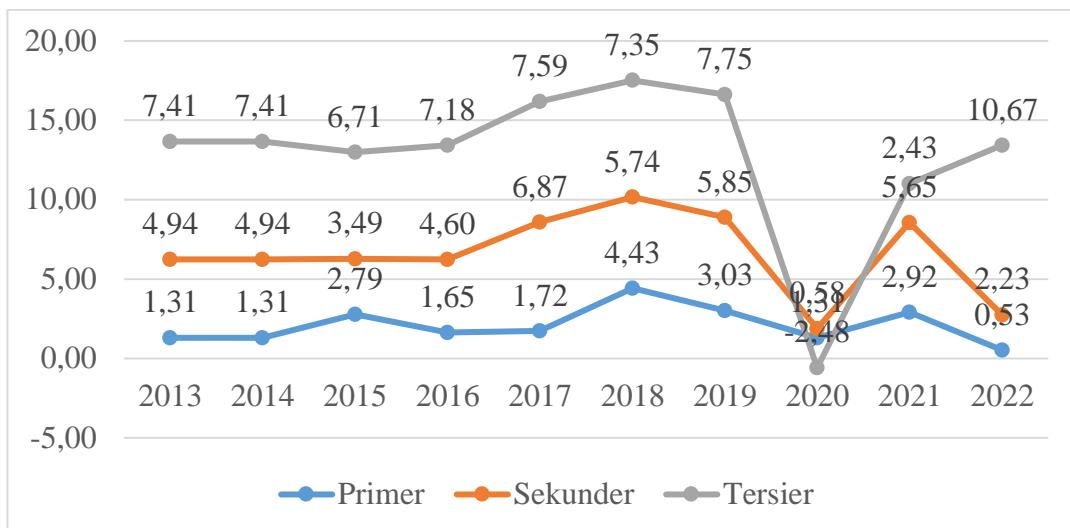
2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan.
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat memungkinkan merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan.
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kriteria kontribusi.

Tabel 4. 8 Hasil Analisis *Overlay*

Sektor	2011		2013		2016		2019		2022	
	RPS	LQ								
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.28	1.93	1.09	1.90	1.39	1.97	1.18	2.00	1.47	2.00
B. Pertambangan dan Penggalian	-0.72	2.38	1.11	2.44	0.01	1.89	1.34	1.86	0.52	1.93
C. Industri Pengolahan	1.38	0.69	1.39	0.71	1.21	0.74	1.44	0.77	0.97	0.8
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.87	0.57	1.24	0.59	0.86	0.58	1.03	0.57	1.07	0.57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.35	1.76	0.59	1.74	0.97	1.76	1.24	1.80	0.91	1.72
F. Konstruksi	0.35	0.57	1.02	0.58	1.17	0.59	1.26	0.61	0.77	0.6
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.86	0.95	1.12	0.95	0.87	0.95	1.09	0.96	0.91	0.93
H. Transportasi dan Pergudangan	0.62	1.09	1.17	1.10	1.13	1.10	1.07	1.07	0.98	1.09
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.79	0.79	0.75	0.78	0.92	0.79	1.11	0.80	0.74	0.8
J. Informasi dan Komunikasi	1.09	0.51	1.16	0.54	1.01	0.53	1.00	0.54	1.01	0.5
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.63	0.82	0.88	0.81	1.02	0.81	1.04	0.81	1.40	0.8
L. Real Estate	0.81	0.65	1.08	0.65	0.99	0.66	1.03	0.66	0.53	0.64
M,N. Jasa Perusahaan	1.10	0.48	1.42	0.51	0.98	0.49	1.04	0.50	0.90	0.51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.67	1.04	1.67	1.05	1.01	1.04	1.01	1.03	0.89	1.02
P. Jasa Pendidikan	1.14	1.31	1.19	1.40	1.05	1.39	1.01	1.39	1.41	1.38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.91	1.24	0.97	1.25	0.98	1.28	1.04	1.29	0.89	1.24
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.64	1.26	1.12	1.28	0.99	1.28	1.02	1.28	0.99	1.29

Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

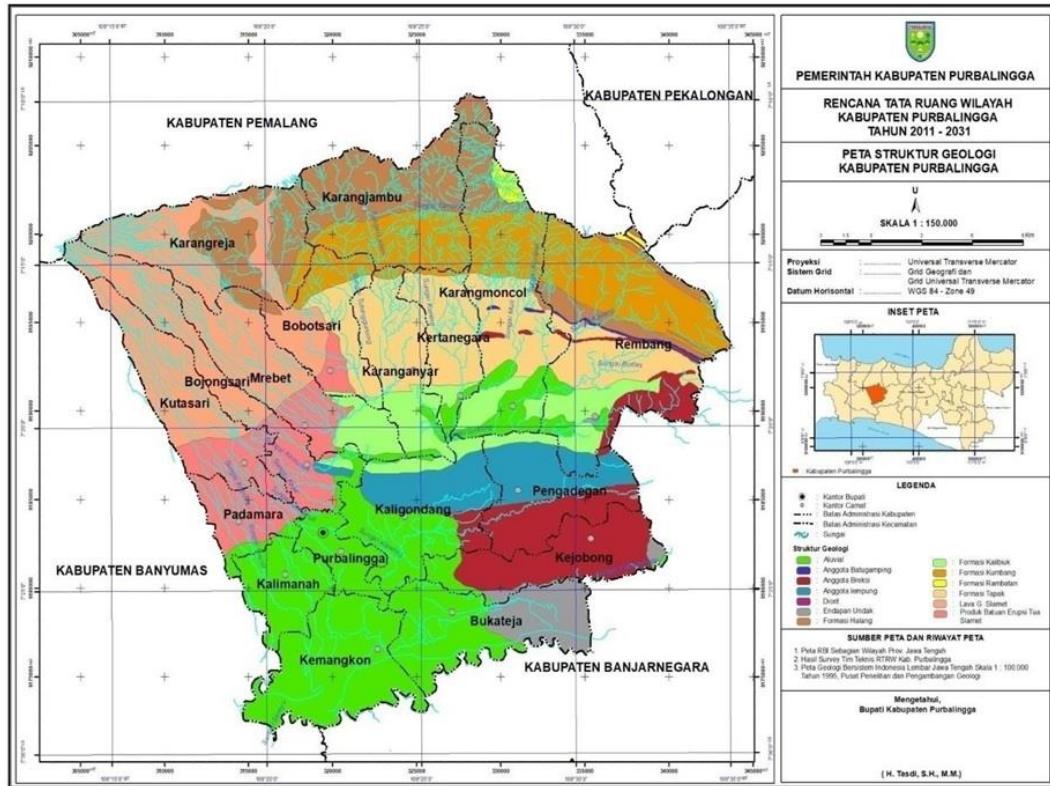
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sektor yang menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2022 hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor jasa pendidikan. Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi hanya terjadi pada tahun 2019, tetapi menjadi sektor yang menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2022. Berbeda dengan sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri menjadi sektor menunjukkan suatu kegiatan yang dominan tetapi kontribusinya kecil dari tahun 2011 sampai dengan 2019, tetapi tahun 2022 sektor tersebut menjadi sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kriteria kontribusi. Sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor yang dominan tetapi kontribusinya kecil pada tahun 2013, 2019 dan 2022. Sektor konstruksi menjadi sektor yang dominan tetapi kontribusinya kecil pada tahun 2013, 2016 dan 2019. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor yang dominan tetapi kontribusinya kecil pada tahun 2013 dan 2019. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi pada tahun 2013, 2016 dan 2019. Sektor informasi dan komunikasi selama kurun 2011 sampai dengan 2022 menjadi sektor yang yang dominan tetapi kontribusinya kecil.



Sumber: Data Sekunder, 2023 (Diolah)

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2013 – 2022

Apabila melihat lebih jauh, maka sektor tersier menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan sektor tersier jauh lebih tinggi dibandingkan sektor primer dan sektor sekunder (Gambar 4.1). Sektor Tersier merupakan sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa lainnya.



Gambar 4. 2 Peta Kabupaten Purbalingga

Secara spasial, pengembangan setiap sektor dapat dilakukan pada setiap wilayah aglomerasi. Pengembangan sektor primer dapat dioptimalkan pada wilayah aglomerasi Bobotsari dan sebelah utara wilayah aglomerasi Bukateja. Pengembangan sektor sekunder dapat dioptimalkan pada wilayah aglomerasi Bukateja, sebelah selatan wilayah aglomerasi Bobotsari dan wilayah aglomerasi Purbalingga. Pengembangan sektor tersier dapat dioptimalkan pada wilayah aglomerasi Purbalingga yang merupakan *Central Bussiness District* (CBD) di Kabupaten Purbalingga. Wilayah Aglomerasi Purbalingga terdiri dari Kecamatan Purbalingga, Kutasari, Kalimanah, Kaligondang, Kemangkon, Padamara, dan Bojongsari. Wilayah Aglomerasi Bobotsari terdiri dari Kecamatan Bobotsari, Mrebet, Karanganyar, Karangjambu, Kertanegara dan Karangreja. Wilayah Aglomerasi Bukateja terdiri dari Kecamatan Bukateja, Kejobong, Karangmoncol, Rembang, dan Pengadegan.

F. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_IPM	4.020844	0.927516	4.335067	0.0015
LN_AK	0.127005	0.079476	1.598029	0.1411
LN_INV	0.242445	0.129630	1.870290	0.0910
C	-5.675532	1.845312	-3.075649	0.0117
R ²	0.996327	F-statistic		904.2227
Adj R ²	0.995225	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9, persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$LN_PDRB_t = -5,675 + 4,021LN_IPM_t + 0,127LN_AK_t + 0,242LN_INV_t$$

Untuk mendapatkan persamaan regresi yang *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE), pengujian terhadap asumsi klasik dan pengujian hipotesis terhadap persamaan regresi yang didapatkan akan dilakukan.

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model persamaan regresi yang *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE), pengujian asumsi klasik perlu dilakukan. Uji asumsi klasik yang diperlukan antara lain multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pembahasan dari masing - masing permasalahan asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

- Uji Deteksi Multikolinieritas

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Tetapi perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktik, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi (Gujarati dan Porter, 2009). Multikolinearitas dalam penelitian dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Terbebas dari masalah multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *Tolerance* lebih dari 0,1.

Tabel 4. 10 Variance Inflation Factor (VIF)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LN_IPM	0.860286	1272734.	6.661455
LN_AK	0.006316	90425.81	2.706862
LN_INV	0.016804	310874.8	61.78639
C	3.405177	284356.8	NA

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (centered VIF) adalah kurang dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

- Uji Deteksi Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati dan Porter, 2009). Untuk menguji masalah

heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji glejser bertujuan untuk meregres nilai absolute residual (AbsU_i) terhadap variabel independen lainnya dengan persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, 2009).

Tabel 4. 11 Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.382151	1.028769	-0.371465	0.7180
LN_IPM	0.071269	0.517094	0.137826	0.8931
LN_AK	0.035268	0.044308	0.795969	0.4445
LN_INV	-0.024910	0.072269	-0.344689	0.7375

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan Tabel 4.11, variabel independen dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja (AK), dan Investasi (INV) tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual persamaan regresi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas masing - masing variabel independen yang lebih besar dari $\alpha= 5$ persen. Hal ini mengindikasikan bahwa persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

- Uji Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota observasi (variabel) yang berlainan waktu. Sedangkan dalam metode OLS salah satunya asumsinya adalah tidak adanya hubungan antar variabel gangguan. Autokorelasi terjadi karena adanya *shock* atau gejolak dalam suatu data, umumnya sering terjadi pada data *time series* sedangkan data cross section jarang mengalami autokorelasi. Dalam mendekripsi adanya autokorelasi digunakan metode Durbin-Watson (DW).

Tabel 4. 12 Uji Statistik Durbin Watson

Nilai statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif atau negatif
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol; ada korelasi negatif

Sumber : Agus Widarjono

Catatan : d_U = nilai kritis batas bawah d_L = nilai kritis batas atas

Hasil analisis regresi berganda dengan Eviews 12 didapatkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,447 dimana DL adalah 0,7767 dan DU adalah 1,778 ($k=3$ dan $n=14$). Nilai DW sebesar 1,447 terletak antara DL dan DU yang merupakan daerah keragu-raguan atau tidak ada keputusan terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Oleh karena ini, penelitian ini melakukan pengujian berikutnya dengan uji Run (Run Test) dengan hasil seperti dibawah ini.

Tabel 4. 13 Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00102
Cases < Test Value	7
Cases \geq Test Value	7
Total Cases	14
Number of Runs	6
Z	-.835
Asymp. Sig. (2-tailed)	.404

a. Median

Tabel 4.13 dari uji Run menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,404 atau lebih besar dari $\alpha= 5$ persen. Hal ini berarti bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *Goodness of fit* atau dalam statistik dapat diukur dengan nilai uji statistik F, koefisien determinasi (R^2), dan nilai uji statistik t.

1) Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis sering disebut pengujian signifikan keseluruhan (*overall significance*) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan dengan X_1, X_2, X_3, X_4 , dan X_5 . Kriteria pengujian nilai F statistik dengan menggunakan *level of confidence* 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah sebagai berikut :

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k = 0$ Semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

H_a : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \neq 0$ Semua variabel atau minimal satu variabel berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Kriteria pengujian dari uji F adalah sebagai berikut:

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{Tabel}}$ maka H_0 diterima;

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{Tabel}}$ maka H_0 ditolak.

Hasil analisis regresi berganda dengan Eviews 12 menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 904,222 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari $\alpha=$

5 persen. Dengan kata lain, variabel Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga.

2) Uji statistik t

Uji satatistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Jika asumsi normalitas *error* terpenuhi maka kita dapat menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial regresi.

Tabel 4. 14 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LN_IPM*	4.020844	4.335067	0.0015	Signifikan
LN_AK	0.127005	1.598029	0.1411	Tidak Signifikan
LN_INV**	0.242445	1.870290	0.0910	Signifikan
C	-5.675532	-3.075649	0.0117	Tidak Signifikan

Keterangan: *) signifikan pada $\alpha= 5\%$

**) signifikan pada $\alpha= 10\%$

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hanya variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0,0015 atau lebih kecil dari $\alpha= 5$ persen dan nilai probabilitas Angkatan Kerja sebesar 0,091 atau lebih kecil dari $\alpha= 10$ persen.

3) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilainya maka kemampuan variabel dependen menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya.

Hasil analisis regresi berganda dengan Eviews 12 menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,9963. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel IPM, Angkatan Kerja, dan Investasi mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga sebesar 99,63 persen.

4) Sintesis

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga tidak dipengaruhi oleh jumlah Angkatan Kerja (AK). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori *endogenous growth models* yang disampaikan oleh Paul M. Romer. Romer memodelkan perkembangan teknologi (*technological progress*) bergantung kepada jumlah total investasi knowledge. Total investasi *knowlegde* ditentukan oleh keputusan individu di suatu daerah. Investasi terhadap knowledge dapat dilakukan melalui pengembangan sektor R&D. IPM sebagai indikator yang mengukur kualitas pembangunan manusia juga menjadi modal berharga bagi peningkatan produktivitas masyarakat dalam perekonomian.

Investasi yang dalam hal ini diukur dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan

barang konsumsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan PMTB juga akan mendorong peningkatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Hasil kajian ini sesuai dengan hasil penelitian Iskandar (2012) dan Bado (2013) yang juga menyatakan bahwa modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berupa barang modal menjadi penggerak kegiatan perekonomian. Jika modal bertambah, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Jumlah angkatan kerja yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga menjadi indikasi bahwa terjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, dari angkatan kerja yang ada belum tentu dapat terserap oleh pasar tenaga kerja. Selain masalah tingkat pengangguran yang semakin meningkat (5,23 persen di tahun 2022 dan naik menjadi 5,61 persen di tahun 2023), tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Purbalingga juga menurun yaitu 94,77 persen pada tahun 2022 menjadi 94,39 persen pada tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:
1. Sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2011 sampai dengan 2022 relatif tidak berubah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.
 2. Hasil analisis shift share juga menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang berarti di Kabupaten Purbalingga. Hal ini terlihat dari kontribusi nasional (national share) selama tahun 2011 sampai dengan 2022 masih dominan dibandingkan dengan kontribusi daerah (proportional shift) dan kontribusi keuntungan lokasional (differential shift).
 3. Sektor yang menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2022 hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor jasa pendidikan. Sektor lain relatif memiliki kondisi beragam.
 4. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, rekomendasi yang dapat diberikan bagi peningkatan perekonomian Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga seyogyanya lebih diprioritaskan tidak kepada sektor yang menjadi unggulan tetapi juga kepada sektor yang tumbuh lebih cepat dan berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dapat didorong oleh peningkatan kualitas manusia (IPM) melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Selain itu, peningkatan investasi (PMTB) juga perlu dilakukan melalui program – program pro investasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah potensi dan unggulan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT Grasindo.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Suatu Penelitian Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE .
- , 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2023. Purwokerto: Badan Pusat Statistik.
- Bado. (2013). Analisis Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah Econosains, 14(2), Agustus 2016.
- Boediono. 1985. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Irawan dan Suparmoko.1992. Ekonomika Pembangunan. Edisi Keenam. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Jhingan, M L. 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Diterjemahkan oleh: D. Guritno.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- , 2012: Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan. Jakarta. : Salemba Empat
- Kurniawan, Lendro. 2005. Analisis Efisiensi Sektor Unggulan di Kabupaten Banyumas Periode 1998-2003. Skripsi IESP UNDIP. Tidak dipublikasikan
- Mankiw, Gregory. 2005. *Kebijakan Moneter dan Pengembangan Ekonomi Daerah*. Edisi terjemah. Jakarta : Salemba Empat
- Maulana, Insan Budi. 1999. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mukhlis, Imam. 2001. Analisis Shift-Share Pada Perekonomian Jawa Timur (1990-1999). Malang. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 2 / I.
- Restiatun. 2009. Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten / Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Vol. 10, No. 1, 77-98.
- Sudarmono, Mulyanto. 2006. Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Daerah di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah. Tesis MIESP UNDIP. Tidak dipublikasikan.
- Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- , 2014. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutarno dan Mudrajad Kuncoro. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas (1999-2000). Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 8.
- Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 1983. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Diterjemahkan oleh: Drs. Mursyid Aminuddin. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
- Tumenggung, S. 1996. Gagasan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia). Jakarta : Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Dapartement PU.
- Usya. 2006. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang. Skripsi. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Wiyadi dan Rina Trisnawati. 2002. Analisis Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah di Eks - Karesidenan Surakarta Menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan.
- <http://cerminanhati.wordpress.com>



©2023